



Siaran Pers

Badan Kerja Sama
Antar-Parlemen (BKSAP)
DPR RI

Sekretariat:

Ged. Nusantara III, Lt. 6
Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta
10270 Indonesia

Website:

<http://ksap.dpr.go.id/>

Twitter:

[@bksapdpr](https://twitter.com/bksapdpr)

Instagram:

[@bksapdpr](https://www.instagram.com/bksapdpr)

YouTube:

[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAP DPR RI)

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Biro KSAP:
021-5715814
biro_ksap@dpr.go.id

Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana Pimpin Delegasi DPR RI di Sidang Parlemen Asia-Pasifik

Manila, Filipina - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana memimpin delegasi DPR RI pada perhelatan Sidang Umum Parlemen Negara-negara Asia Pasifik atau Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-31 di Manila, Filipina, pada 23-26 November 2023. Sidang APPF dibuka secara resmi oleh Presiden Senat Parlemen Filipina Juan Miguel Zubiri.

Sidang tahunan APPF kali ini dihadiri oleh 19 negara anggota APPF yang mencakup negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur, Amerika Latin dan Amerika Utara, serta Oseania. Gelaran Sidang APPF kali ini mengusung tema "*Resilient Partnerships for Peace, Prosperity and Sustainability*" yang mencakup berbagai isu mulai kerjasama keamanan maritim, kerjasama pendidikan, kesehatan, budaya hingga kesetaraan gender.

Sebagai Ketua Delegasi, Putu Supadma Rudana menyampaikan posisi delegasi DPR RI yang akan terus memanfaatkan perhelatan APPF untuk memperkuat peran dan posisi Indonesia di Asia-Pasifik. Menurutnya, Asia-Pasifik merupakan wilayah strategis yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, tantangan geopolitik, geoekonomi, dan tantangan keamanan seperti di Laut Tiongkok Selatan (LTS) terus membayangi stabilitas kawasan.

Karena itu, Delegasi DPR RI menginisiasi kerjasama keamanan maritim melalui resolusi berjudul "*Enhancing Maritime Security Cooperation in Asia-Pacific*", Melalui resolusi tersebut, DPR RI mengajak seluruh parlemen negara-negara Asia-Pasifik untuk memperkuat kerjasama keamanan maritim. Beberapa penekanan dalam resolusi tersebut antara lain seruan untuk penyelesaian kode etik atau *Code of Conduct (COC)* untuk menyelesaikan sengketa klaim teritorial.

Usulan Indonesia disambut baik oleh peserta Sidang APPF yang akhirnya digabungkan dengan usulan resolusi dari Chile, Russia, Jepang, Meksiko, dan Filipina yang memiliki konsen serupa dalam mendorong peran parlemen dalam menciptakan keamanan dan stabilitas kawasan.

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi VI DPR RI itu juga turut aktif menyampaikan posisi Indonesia terkait upaya menanggulangi kejahatan transnasional, kerjasama pendidikan dan budaya. Selain itu, Putu juga memimpin Delegasi DPR RI melakukan bilateral dengan parlemen Papua New Guinea (PNG), Federasi Mikronesia, dan Malaysia.

Pada sidang tersebut, Putu Supadma Rudana hadir bersama dengan Wakil Ketua BKSAP Achmad Hafisz Thohir. Selain itu, turut hadir pula anggota Delegasi yaitu Hugua dan Vanda Sarundajang dari Fraksi PDI-P, Himmatul Aliyah dari Fraksi Gerindra, Putri Anetta Komarudin dari Fraksi Partai Golkar, Syahrul Aidi Maazat dari Fraksi PKS, Arzetti Bilbina dari Fraksi PKB, serta Emma Umiyatul Chusnah dari Fraksi PPP.